

# ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019-2022

Bellany Betta\*<sup>1</sup>, Aimmatul Chasanah<sup>2</sup>, Enggar Adi K<sup>3</sup> Putri Anggilia D<sup>4</sup> Shelly Rasyta A<sup>5</sup> Khofifah Apsari<sup>6</sup>

Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jateng 56116 (0293) 364113 | Telp (0293) 362438

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: \*[bellanybetta002@gmail.com](mailto:bellanybetta002@gmail.com), [aimmatulchasanah5@gmail.com](mailto:aimmatulchasanah5@gmail.com)  
[enggaradijuli2003@gmail.com](mailto:enggaradijuli2003@gmail.com)<sup>3</sup>, [anggiliadeviana@gmail.com](mailto:anggiliadeviana@gmail.com)<sup>4</sup>, [bellany.betta002@gmail.com](mailto:bellany.betta002@gmail.com)  
<sup>5</sup>, [shellyrasytaananda@gmail.com](mailto:shellyrasytaananda@gmail.com)<sup>6</sup>, [khofifahapsari01@gmail.com](mailto:khofifahapsari01@gmail.com)

## ABSTRACT

*Pembangunan tidak terlepas dari peran perempuan, seperti halnya pembangunan politik. Pembangunan politik yaitu proses menuju sistem demokrasi yang lebih liberal berdasarkan proses pemilu yang bebas dan adil, sehingga secara konseptual melindungi hak-hak sipil warga negara. Namun yang terjadi dilapangan peran perempuan dalam politik belum sepenuhnya berpartisipasi, seperti halnya di Kabupaten Wonosobo, Menurut (Sekertariat DPRD Kabupaten Wonosobo, 2023)hanya ada satu perempuan yaitu Izanatul Muziah dari Partai PDIP yang akan dilibatkan di DPRD pada 2019-2024 . Oleh karena itu hal ini penting dan menarik untuk dianalisis dan dideskripsikan secara mendalam terkait Solusi Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembangunan politik khususnya di Kabupaten Wonosobo dan mengetahui solusi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan Metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan WID, WAD, GAD menunjukan Partisipasi perempuan di Wonosobo belum mampu dalam praktiknya. Dengan demikian pemerintah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan politik.*

*Keywords Partisipasi Perempuan, Peran Perempuan, Pembangunan Politik*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu perubahan dari hal yang kurang atau belum baik menjadi lebih baik di dalam sebuah bidang sosial, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, sarana, prasarana, sosial dan budaya. Artinya, semua mencakup segala bidang dari sebuah negara untuk melangkah kearah kemajuan, yang tentu

dilakukan dengan rencana yang matang dan terstruktur. Hal ini seperti yang diungkapkan Mansour Fakhri (2009), bahwa pembangunan adalah perubahan sosial atau proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, infrastruktur, masyarakat, dll dalam sebuah negara. Seperti yang ada dalam sila kelima pancasila, seharusnya pembangunan dilakukan secara adil dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial. Pembangunan mungkin selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak tebang pilih terhadap gender, nyatanya ada beberapa wilayah di Indonesia dalam pembangunan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak bebas nilai dan gender (Ratna,2005).

Kedudukan manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai subyek pembangunan, tetapi juga obyek pembangunan. Jadi pria dan wanita memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dari perspektif kondisi normatif, status dan peran laki-laki dan perempuan adalah sama, namun dari perspektif kondisi objektif terlihat bahwa perempuan jauh tertinggal dari laki-laki dalam segala bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini tentu saja menyebabkan pertanyaan: Mengapa status dan peran perempuan tertinggal dalam program pembangunan?

Pembangunan politik tidak lepas dari partai politik. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang dua partai politik menguatkan aturan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dibidang politik yaitu “pendirian dan pembentukan partai politik dengan menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Adanya

kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan suatu pintu utama saat ini. Hal tersebut karena keterwakilan perempuan diperlukan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan.

Kebijakan itu berkenaan erat dengan bagaimana kemudian dampaknya terhadap representasi perempuan dalam politik (Hughes, 2011). Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislative sebanyak minimal 30% merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan partisipasi perempuan dibidang politik serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terlibat dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan baik di dalam partai politik maupun didalam lembaga pemerintahan.

Timbulnya isu tentang ketidaksetaraan gender tentu tidak jauh dari gagalnya pengimplementasian dari ideologi pembangunan (*developmentalism*) dalam mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat, termasuk permasalahan tentang keikutsertaan perempuan dalam bidang pembangunan yang diangkat dalam konsep WID, WAD, dan GAD. Dalam bidang pembangunan, keikutsertaan perempuan bisa dianalisis dengan tiga konsep diatas, misal dalam WID yaitu seorang perempuan perlu memiliki rasa kemandirian supaya pembangunan dapat dinikmati semua. Sedangkan dalam konsep WAD yaitu perempuan perlu menjalin sebuah hubungan

dan andil dalam proses pembangunan. Sementara itu dalam konsep GAD yaitu dengan memusatkan isu ketimpangan gender dan tidak pada masalah perempuan semata, kemudian juga menempatkan posisi perempuan sebagai agen perubahan.

Pembangunan politik merupakan bagian dari proses menuju sistem demokrasi yang lebih liberal berdasarkan proses pemilu yang bebas dan adil, sehingga secara konseptual melindungi hak-hak sipil warga negara. Untuk masalah ketimpangan gender dapat dilihat dari pembangunan politik misalnya seperti minimnya keikutsertaan perempuan dalam DPRD di Jawa Tengah. Menurut data dari (Puskapol UI, 2019), partisipasi perempuan dalam DPRD provinsi hanya sebanyak 22 perempuan dari 120 anggota DPRD di Jawa Tengah. Menurut data dari BPS Jawa Tengah terkait IDG provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024, Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori rendah dengan presentase keterwakilan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,44%, disusul terendah kedua yaitu Kota Pekalongan 8,57%, dan terendah ketiga yaitu Kabupaten Kudus dengan presentase 8,89%. Jadi dapat dikatakan Kabupaten Wonosobo, merupakan salah satu penyebab dominan rendahnya partisipasi perempuan dalam keterwakilan di ranah legislatif.

Minim partisipasi perempuan dalam keanggotaan DPRD, Kabupaten Wonosobo menempati peringkat 35 Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah dengan skor 48,70. Indeks pemberdayaan gender bertujuan untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. IDG menunjukkan betapa aktifnya perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG berfokus pada partisipasi dengan mengukur ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Namun keterwakilan perempuan pada ranah legislatif di Kabupaten Wonosobo hanya ada satu perempuan dengan nama Izanatul Muziah dari partai PDIP yang akan dilibatkan di DPRD kabupaten pada 2019-2024 (Ari, 2022). Sementara itu, kepemimpinan di ranah politik termasuk wadah dari anggota perwakilan rakyat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang akan ditujukan untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul partisipasi perempuan dalam pembangunan politik di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan politik khususnya di Kabupaten Wonosobo dan mengetahui solusi dalam meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berarti sumber data dan pengambilan data melalui berbagai kajian literatur, seperti artikel, buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang di angkat. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh sumber data informasi secara faktual sehingga data yang disajikan dapat memperkuat hasil pembahasan mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik untuk meningkatkan pembangunan Nasional di Kabupaten Wonosobo.

Dengan demikian melalui metode penelitian studi literatur ini peneliti dapat menganalisa dan mendeskripsikan objek terkait partisipasi perempuan dalam politik di Wonosobo lebih mendalam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa bidang dalam pembangunan di Indonesia tidak lepas dari nilai dan pertimbangan gender dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, dimana pembangunan tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mendiskriminasi gender. Seorang perempuan yang mampu melahirkan masih dipandang memiliki fungsi yang tetap dan permanen dalam masyarakat. Penilaian terhadap program yang dilakukan merupakan hasil dari kegagalan inisiatif pembangunan yang dilakukan di negara-negara terbelakang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan merupakan

salah satu penyebab yang teridentifikasi. Hal tersebut memotivasi pemerintah di negara-negara terbelakang untuk membangun paradigma pembangunan baru yaitu pembangunan yang berorientasi gender.

Partisipasi perempuan di daerah Wonosobo masih tergolong rendah karena faktor pendidikan dan pengetahuan yang mana masih dilevel bawah atau masih rendah, serta berkaitan dengan faktor pekerjaan yang dimiliki masyarakat yang mana banyak menyita waktu sehingga membuat masyarakat belum dapat terlibat sepenuhnya dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan. Berdasarkan data [sidesa.jatengprov.go.id](https://sidesa.jatengprov.go.id) pada tahun 2020, jumlah penduduk desa berdasarkan pekerjaan paling banyak yaitu PNS dimana wanita sebanyak 13.881 jiwa sedangkan laki-laki 35.599 jiwa. Meskipun banyak yang bekerja menjadi PNS namun IDG pada Kabupaten Wonosobo masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat kepercayaan kaum wanita untuk terjun dalam politik. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bupati Wonosobo, yang mengatakan bahwa masih adanya ketidakpercayaan kaum wanita terhadap kepemimpinan perempuan (Mercusuar, 2023).

Di sisi lain, di Kabupaten Wonosobo komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat dalam hal pembangunan yang ingin direncanakan kedepannya masih menjadi hambatan. Hal tersebut dibuktikan

pada kasus Stunting pada Kabupaten Wonosobo yang menjadi Kabupaten dengan Angka Stunting tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 angka stunting di Wonosobo mencapai 20,1 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 22,7 persen yang mana awalnya 28,1 persen (Aziz, 2023). Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya peran perempuan dalam pembangunan terutama pembangunan kesehatan yang mana seharusnya perempuan punya peran signifikansi untuk mencegah masalah stunting.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Wonosobo yang masih rendah dengan nilainya yaitu 48,70. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan bentuk upaya untuk melihat dan mengetahui peranan perempuan dalam pembangunan. Di sisi lain IDG berfungsi untuk menunjukkan kesanggupan perempuan untuk ikut serta aktif berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Tiga dimensi dalam IDG yaitu Keterwakilan di parlemen dengan indikator presentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator presentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator

presentase upah buruh ini pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Dari penjelasan tersebut dapat diklasifikasikan beberapa pendekatan yang menginginkan keikutsertaan para perempuan di dalam program pembangunan atau pembangunan yang berwawasan gender, diantaranya yaitu:

**a) *Women In Development (WID)***

Secara teoritis pendekatan WID berfokus pada akses perempuan dalam keterlibatan pembangunan (Sri & Hayati, 2016). Adanya isu ekonomi dimana banyak perempuan yang tidak memiliki cukup uang dan memilih menyerah terhadap pasangannya. Dalam pendekatan praktisnya, dibangunnya konsep WID berdasarkan pada pengakuan akan pentingnya peran dan status perempuan dalam proses pembangunan yang memberikan perhatian khusus pada peran perempuan, perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara positif sebagai pemain penting dalam proses pembangunan.

Dalam kasus diatas dimana terdapat keikutsertaan perempuan atas partisipasi politik yang ada dalam pembangunan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan kurang maksimalnya peran perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik yang mengakibatkan pendekatan WID ini gagal karena tidak mampu menangani hubungan dan peran Gender yang tidak setara serta fakta bahwa status perempuan akan meningkat

dengan beralih ke “pekerjaan produktif” meskipun kinerjanya belum data dinilai produktif sepenuhnya.

**b) *Women And Development (WAD)***

Dalam pendekatan teoritis dikatakan bahwa kaum perempuan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil dan merata jika pengaruh budaya patriarki belum dapat diatasi (Hasanah & Musyafak, 2018), hal tersebut diasumsikan terdapat kekhawatiran mengenai batasan penjelasan teori modernisasi. Secara praktisnya, paradigma Women And Development ditekankan dalam hubungan para perempuan dan pekerjaannya dalam masyarakat mereka sebagai pelaku ekonomi secara umum maupun domestik. Dalam pendekatan WAD juga menekankan sifat khas dari pengetahuan, pekerjaan, tujuan, dan tanggung jawab perempuan, serta mengadvokasi pengakuan atas kekhasan mereka. Dalam penerapan dari pendekatan WAD terdapat beberapa kritikan mengenai peran perempuan dan pembangunan diantaranya yaitu: yang pertama, kekhawatiran bahwa proyek pembangunan khusus perempuan akan mengalami kesulitan dan bahkan gagal hal tersebut dapat dilihat dan dapat dijadikan evaluasi pada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang melibatkan partisipasi politik di dalamnya bahwa pembangunan perempuan jugamembutuhkan partisipasi dari banyaknya perempuan yang ada untuk mencapai

keberhasilan pembangunan. Yang kedua, karena perspektif WAD mengalami kecenderungan untuk melihat perempuan sebagai sebuah kelas, dan kurang memperhatikan perbedaan di antara perempuan dan pendekatan ini cenderung berkonsentrasi pada pengembangan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Pendekatan WAD telah diterapkan di Kabupaten Wonosobo berupa pemberdayaan perempuan dan anak yang selenggarakan oleh Anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Menurut Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, GOW memiliki pengaruh kuat di lingkungannya sekaligus turut berkiprah dalam memajukan Wonosobo. Adanya pemberdayaan yang dilakukan GOW menjadikan ruang yang luas untuk berkarya dan berkontribusi para perempuan. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) memiliki visi dan misi pembangunan yang diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (Suyitno, 2022).

**c) *Gender And Development (GAD)***

Pendekatan GAD tidak secara khusus memperhatikan perempuan, tetapi dengan cara masyarakat menetapkan peran, tanggung jawab, dan ekspektasi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Secara teoritis, yang menjadi fokus utama GAD ialah pembagian kerja berdasarkan pada gender yang mana

gender sebagai hubungan kekuasaan yang ditanamkan terhadap lembaga dan secara praktisnya ialah diterapkannya analisa terhadap gender guna mengungkapkan berbagai cara laki-laki dan perempuan bekerja sama, menyajikan hasil dalam konteks ekonomi dan efisiensi yang netral.

Melalui stratetgi ini, diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender, sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat secara operasional. Setiap partisipasi dari masyarakat maupun pelaku yang terlibat dalam pembangunan perlu adanya kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan yang menyertakan peranan perempuan didalamnya dengan menunjukkan kesanggupan perempuan untuk ikut serta aktif berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Namun, pendekatan GAD ini juga menekankan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga mengabaikan ikatan di antara mereka dan juga potensi perubahan peran, pedekatan GAD secara teori memanglah berbeda dengan kedua pendekatan sebelumnya akan tetapi secara praktinya tetap meliputi pendekatan WID dan pendekatan WAD. Fokus utama pendekatan ini adalah mengenai gender akan tetapi secara praktik masih berfokus pada pendekatan perempuan dalam pembangunan.

Dengan demikian, menunjukkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo yang sangat rendah karena hanya terdapat satu orang (Sekertariat DPRD Kabupaten Wonosobo, 2023) menimbulkan kekhawatiran terkait pelaksanaan partisipasi perempuan secara politik dalam pembangunannya dengan ketiga pendekatan diatas tidak mampu memenuhi dalam paktiknya. Padahal, kepemimpinan di ruang lingkup politik merupakan tempat atau wadah anggota perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang akan ditujukan kepada masyarakat.

Terbatasnya Kiprah Perempuan dalam ruang politik menunjukkan lemahnya pengawalan Implementasi Kebijakan Perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kondisi ini memberikan tugas untuk seluruh masyarakat agar melakukan upaya Perempuan Wonosobo bermartabat, agar terbentuk ruang-ruang diskusi untuk melakukan hal yang penting dan berguna bagi khalayak umum.

Padahal, peran perempuan dalam politik sangatlah penting. Di Indonesia merupakan negara yang demokrasi yang berarti setiap orang atau kelompok baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi, menentukan dan membuat keputusan serta kebijakan politik dalam sistem demokrasi. Dengan hal tersebut tentu tidak ada tindakan diskriminasi antara

laki-laki maupun perempuan di mana keduanya memiliki posisi peran dan kesemanan yang sama untuk masuk ke dalam bagian dunia politik seperti legislatif. Dalam konteks politik di Indonesia, status perempuan sebagai bagian dari bangsa yang harus memberikan hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang sudah terakomodasi dalam konstitusi negara kita.

Diperlukannya peran perempuan untuk masuk ke legislatif bukan semata-mata untuk menuntut keadilan demokrasi, namun juga sebagai peran agar kepentingan perempuan juga harus di perhatikan. kepentingan perempuan (*Women's interest*) tidak tunggal atau homogen. Sebaliknya sangat heterogen, baik atas dasar status sosial, ras, agama, etnik maupun lokasi geografis. Jika dunia politik di isi oleh kaum laki-laki tentu tidak semua “kepentingan perempuan” dapat terwakilkan. Hal ini karena selama ini masalah yang dihadapi masyarakat merupakan masalah perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Perempuan identik memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan memiliki pola berfikir yang holistic serta be responsif. Di sisi lain Perempuan menjadi “panutan” (*role model*)” yakni menjadi

motivasi atau acuan yang menimbulkan aspirasi dan pemberi semangat bagi perempuan lain serta legitimasi kelembagaan politik. Dalam hal ini menunjukkan sistem politik memberikan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik formal.

Dalam demokrasi, kesetaraan gender diterapkan dalam peranan persamaan derajat di seluruh wilayah dan ranah publik terutama dijabatan sebagai pengambil keputusan. Adanya beberapa dari seluruh masyarakat Wonosobo dinilai belum memercayai sepenuhnya dengan peranan perempuan yang terjun dalam bidang politik terlebih lagi dalam Lembaga legislatif. Banyak statement publik yang mengatakan perempuan yang terjun di bidang politik sebagai anggota legislatif kurang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan adanya diskriminasi gender di seluruh aspek kehidupan dan sektor pembangunan. Dalam platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW*) memberikan rekomendasi terhadap pemerintah di seluruh dunia untuk menyediakan kuota sebagai langkah khusus (sementara) untuk meningkatkan jumlah perempuan pada jabatan appointif maupun elektif di tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Perempuan memiliki makna yang penting dalam

pemahamannya dan menyatukan persepsi seberapa pentingn pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis.

Ketidakadilan gender pada tingkatan kebijakan yang masih bias gender menyebabkan perempuan sebagai pelaku pembangunan belum sepenuhnya diterima di lingkungan politik maupun aspek pembangunan yang lain. Oleh karena itu, bentuk representasi perempuan di ranah di ranah legislatif masih minim. Sebagai Langkah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan ialah Pendidikan politik sebagai pemenuhan orientasi politik oleh setiap individu maupun kelompok. Perlu ditekankannya kesetaraan gender agar tidak ada keterbatasan peranan dalam politik dan perlunya peningkatan kepercayaan dengan adanya perempuan sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional memiliki arti pentingnya pengupayaan wujud keharmonisan dari kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki.

Untuk meningkatkan prosentase keterwakilan perempuan pada bidang politik di wonosobo dapat dilakukan dengan beberapa program yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi perempuan di ranah legilatif sehingga dapat mencapai kriteria yang telah di tentukan yaitu 30%. Adapun program tersebut yaitu:

## **1. Gabungan organisasi Wanita (GOW)**

GOW merupakan suatu organisasi yang memiliki banyak pengalaman dalam dinamika kehidupan berorganisasi, baik dari sisi internal maupun eksternal karena GOW sudah ada sejak 1962. Di Kabupaten Wonosobo kegiatan ini sudah berjalan dengan lama. Di wonosobo telah dilakukan pengukuhan pengurus Gabungan Organisasi Wanita periode 2021-2026. Bupati Wonoso melantik GOW yang berjumlah 36 anggota.

Tujuan adanya GOW adalah untuk memberikan ruang seluas luasnya untuk memajukan perempuan di Kabupaten Wonosobo. Sebagai wadah atau forum koordinasi wanita yang dengan tingkatan lokal GOW diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta peran, bersama dengan pemerintah yang nantinya mengatasi permasalahan di Kabupaten Wonosobo, baik dari lingkup pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempan serta perlindungan perempuan dan anak.

GOW sebagai forum untuk berbagai organisasi yang isinya para perempuan untuk mengusung nafas perjuangan para pendahulu. Hal tersebut karena ketika kita kembali padan konsep WID dan WAD Peran perempuan belum tertalu di tonjolkan, karena ketidakpuasan terhadap konsep tersebut akhirnya muncul GAD. Dengan Adanya GAD ini akhirnya memperjuangkan kemajuan kaum perempuan dan kesetaraan gander.

Dengan adanya partisipasi perempuan dalam GOW di Kabupaten Wonosobo dapat menjadi wadah aspirasi dan eksistensi pemberdayaan perempuan, di mana kesetaraan perempuan serta laki-laki dimanifestasikan dalam berbagai ide dari banyak kepentingan yang dilatarbelakangi pendidikan, sosial, politik.

Hasil dari GOW di Kabupaten Wonosobo menurut Nurhidayati Agung, GOW sudah bekerja secara maksimal, namun ternyata masih ada yang harus diperjuangkan yaitu dalam hak-hak perempuan dan anak. Mantan Ketua Umum GOW, juga berharap GOW Wonosobo sering melakukan diskusi serta bertukar pikiran dengan bupati agar dapat meningkatkan kualitas dan peran GOW dalam membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang harus melibatkan peran perempuan.

## **2. Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan**

Pendidikan politik bagi kaum perempuan bertujuan untuk agar para kaum perempuan melek politik, melek digital dan informasi serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan. Hal tersebut karena tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Seperti halnya, Bupati Wonosobo gencar melakukan Pendidikan politik bagi kaum perempuan salah satunya melakukan sosialisasi di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwor, Kabupaten wonosobo (Masito, 2023). Dalam sosialisasi tersebut Bupati

Wonosobo mendorong kepada para kaum ibu-ibu untuk memperkuat berkomitmen untuk memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan salah satunya melalui dunia politik.

Tidak hanya itu, Kader perempuan PDI Perjuangan di Kabupaten Wonosobo telah mengikuti Pendidikan Politik Pembekalan Kader Perempuan PDIP dengan tujuan meningkatkan kapasitas kader perempuan dalam berpartisipasi, kontribusi serta membentuk arah kebijakan khususnya untuk para perempuan (Sunandar, 2021).

## **3. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)**

Dalam berpolitik, semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan gender. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Arif Nurhidayat telah melantik pengurusan KPPI periode 2017-2022. Pengurusan KPPI Kabupaten Wonosobo di ketuai oleh Sundijah. Tujuan KPPI yaitu sebagai wadah politisi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan yang handal dan mampu tampil di ranah publik. Perempuan Indonesia tidak hanya sebagai target yang hendak direbut hatinya untuk didapatkan suaranya. Namun perempuan juga termasuk sebagai pejuang politik yang berupaya mempraktekkan politik. Di sisi lain menurut Yani kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik dapat disebabkan karena kurang mendapat support dari keluarga untuk terjun ke politik. faktor lain juga karena masih banyak

yang beranggapan bahwa perempuan sering dinilai tidak pantas untuk duduk di lembaga legislative.

#### 4. SIMPULAN

Adanya pendekatan perempuan dalam pembangunan yaitu WID, WAD, GAD khususnya pada keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Kabupaten Wonosobo masih termasuk rendah hal tersebut dibuktikan keterlibatan perempuan dalam ranah legisaltif hanya satu perwakilan yaitu Izanatul Muziah (Sekertariat, 2023). Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik karena kurangnya kepercayaan dari seorang perempuan untuk menjadi pemimpin.

Dengan adanya kondisi seperti ini masyarakat wonosobo harus berupaya untuk meningkatkan dengan melalui:

1. Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
2. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)
3. Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan

Dengan hal tersebut membuktikan bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam berbagai kehidupan, namun hingga saat ini posisi perempuan di kalangan masyarakat dijadikan nomor duakan. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya partisipasi dalam kehidupan publik. Perempuan yang sudah mendapatkan stigma bahwa perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ari, S. (2022). *Suarakan Kesetaraan Gender, Perempuan Wonosobo ditantang Masuk Dunia Politik*. Wonosobo.Sorot.Co. <https://wonosobo.sorot.co/berita-5028-suarakan-kesetaraan-gender-perempuan-wonosobo-ditantang-masuk-dunia-politik.html>
- [2] Aziz. (2023). *Turunkan Prevalensi Stunting di Atas Capaian Nasional, Wonosobo Peroleh Dana Insentif Fiskal*. Jatengprov.Go.Id.
- [3] Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). *Sosiologi Gender: Konsep, Teori Dan Analisis*. Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 12, 409–432.
- [4] Malau, W. (2015). *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2), 125.
- [5] Masito, I. (2023). *Bupati Wonosobo Dorong Perempuan Tingkatkan Partisipasi Politik*. Tribunnewsjateng.
- [6] Mercusuar. (2023). *Indeks Gender di Wonosobo Rendah, Keterwakilan Perempuan di Legislatif Hanya 4,4 Persen*. Mercusuar.Co.
- [7] Perdana, Aditya, dkk. (2017). *Pembekalan calon anggota legislatif (caleg)*.
- [8] Puskapol UI. (2019). *Data DPRD Provinsi Terpilih 2019- Jawa Tengah*. Puskapol.Ui.Ac.Id.
- [9] Sekertariat, D. K. W. (2023). *Sekertariat DPRD WONOSOBO*. Setwan.Wonosobokab.Go.Id.
- [10] Sri, S., & Hayati. (2016). *GENDER dan PEMBANGUNAN*.
- [11] Sunandar, A. (2021). *Puluhan Kader PDIP Wonosobo Ikuti Pendidikan Politik Puan Indonesia*. Wonosobo.Sorot.Co.
- [12] Suyitno, H. (2022). *Bupati Wonosobo: GOW Turut berkiprah memajukan perempuan*. Jateng.Antarnews.Com.